Jurnal Sejarah Indonesia
ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564)
Volume 9 Nomor 2 2026
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi

Menggugat Rezim: Kontribusi Gerakan Mahasiswa Islam dalam Aksi Reformasi 1998

Allya Nur Anggraini[1*]

[1]Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email: allyanuranggraini089@students.unnes.ac.id

*Korespondensi

Received: 13-10-2025, Revised: 28-10-2026, Accepted: 03-11-2026, Published: 30-11-2026

Abstrak

Reformasi 1998 menjadi transformasi politik krusial di Indonesia, di mana gerakan mahasiswa mendorong akhir kekuasaan Orde Baru pimpinan Soeharto, akibat krisis moneter dan KKN sistematis. Buku Menggugat Rezim: Kontribusi Gerakan Mahasiswa Islam dalam Aksi Reformasi 1998 mengkaji peran gerakan mahasiswa Islam sebagai aktor utama dalam protes nasional yang memicu pengunduran diri Soeharto. Dengan analisis sejarah deskriptif kritis berbasis tinjauan literatur dari jurnal artikel dan buku sejarah, studi ini mengungkap dinamika kelompok seperti HMI, GMII, dan jaringan Islam kampus dalam demonstrasi massa serta wacana oposisi yang menggabungkan nilai Islam dengan tuntutan demokrasi dan keadilan sosial. Temuan utama menyoroti strategi mobilisasi mereka melalui masjid kampus sebagai pusat koordinasi, pamflet ilegal, dan aliansi lintas ideologi yang mengatasi represi negara, memperkuat gelombang Reformasi. Kesimpulannya, kontribusi gerakan ini mempercepat runtuhnya rezim otoriter, membentuk fondasi demokrasi pasca-1998, dan memberi inspirasi bagi aktivisme pemuda kontemporer melawan otoritarianisme.

Kata Kunci: Gerakan Mahasiswa Islam; Reformasi 1998; Rezim Orde Baru

Abstract

The Reformasi of 1998 was a crucial political transformation in Indonesia, where student movements drove the end of the New Order regime under Suharto, triggered by monetary crises and systemic KKN. The book Challenging the Regime: The Contribution of the Islamic Student Movement in the 1998 Reform Actions examines the Islamic student movement's role as a primary actor in national protests leading to Suharto's resignation. Through descriptive-critical historical analysis based on literature reviews from journal articles and history books, this study reveals the dynamics of groups like HMI, GMII, and campus Islamic networks in mass demonstrations and oppositional discourses integrating Islamic values with demands for democracy and social justice. Key findings highlight their mobilization strategies using campus mosques for coordination, illegal pamphlets, and cross-ideological alliances that overcame state repression, bolstering the Reformasi wave. In conclusion, their contributions accelerated the authoritarian regime's downfall, shaped post 1998 democratic foundations, and inspire contemporary youth activism against authoritarianism.

Keywords: Islamic Student Movement; New Order Regime; Reformasi 1998

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Reformasi 1998 merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah modern Indonesia, yang menandai akhir dari era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dekade pemerintahan otoriter yang ditandai oleh stabilitas ekonomi awal namun diakhiri oleh krisis moneter Asia 1997-1998, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak fondasi negara (Aspinall, 2005). Gerakan mahasiswa, sebagai aktor utama dalam demonstrasi massal yang memuncak pada pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998, telah banyak dibahas dalam literatur sejarah kontemporer sebagai katalisator perubahan demokrasi, dengan kontribusi mereka yang mencakup mobilisasi massa, pembentukan koalisi lintas kelompok, dan penekanan pada tuntutan reformasi struktural seperti pemilu bebas dan supremasi hukum (Hadiz, 2010). Namun, meskipun peran gerakan mahasiswa secara keseluruhan telah didokumentasikan secara luas, aspek spesifik kontribusi gerakan mahasiswa Islam seperti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) masih kurang dieksplorasi secara mendalam, terutama dalam hal bagaimana mereka mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan strategi perlawanan politik untuk memperkaya narasi Reformasi yang lebih inklusif (Effendy, 2003).

Studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Aspinall (2005) dalam analisisnya tentang oposisi terhadap Soeharto, menyoroti dinamika gerakan mahasiswa secara umum sebagai respons terhadap represi negara dan krisis ekonomi, tetapi cenderung mengabaikan dimensi ideologis berbasis agama, di mana gerakan mahasiswa Islam tidak hanya berpartisipasi dalam aksi jalanan tetapi juga membangun jaringan melalui masjid kampus dan media bawah tanah untuk menyebarkan kritik terhadap rezim (Hadiz & Robison, 2005). Kekurangan ini menjadi celah penelitian yang signifikan, karena meskipun literatur tentang Islam politik di Indonesia pasca Orde Baru telah berkembang seperti karya Effendy (2003) yang membahas peran ulama dan pemuda Muslim dalam transisi demokrasi jarang ada yang secara khusus menganalisis bagaimana gerakan mahasiswa Islam berkontribusi dalam membentuk momentum Reformasi 1998, termasuk tantangan represi seperti Tragedi Trisakti dan Semanggi yang menewaskan puluhan demonstran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti kontribusi unik gerakan mahasiswa Islam dalam aksi Reformasi 1998, menggunakan pendekatan sejarah analitis berbasis tinjauan literatur dari jurnal artikel dan buku sejarah, untuk mengungkap bagaimana integrasi nilai Islam dengan tuntutan demokrasi mempercepat jatuhnya rezim otoriter dan meletakkan dasar transisi pasca 1998. Tujuan utama makalah ini adalah untuk menganalisis dinamika kontribusi gerakan mahasiswa Islam termasuk strategi mobilisasi, narasi ideologis, dan dampak pasca Reformasi serta menyoroti kesimpulan bahwa peran mereka tidak hanya memperkaya dinamika Reformasi tetapi juga memperkuat fondasi pluralisme demokrasi Indonesia.

Reformasi 1998 tidak hanya merepresentasikan perjuangan melawan otoritarianisme di Indonesia, tetapi juga mencerminkan gerakan sosial berbasis pemuda di negara-negara berkembang yang menghadapi krisis legitimasi rezim, seperti yang terlihat dalam transisi demokrasi di Amerika Latin dan Asia Timur

(Huntington, 1991). Pentingnya studi ini terletak pada signifikansinya bagi pemahaman historiografi Indonesia kontemporer, di mana peran elemen keagamaan dalam gerakan sekuler sering kali diremehkan, padahal hal itu memberikan pelajaran berharga bagi aktivisme masa kini, seperti dalam menghadapi isu demokrasi di tengah polarisasi politik pasca 2014 (Mietzner, 2015). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terutama untuk aksesibilitas pemahaman bagi pembaca di luar bidang sejarah politik, di mana istilah seperti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) didefinisikan sebagai praktik koruptif sistematis yang menjadi ciri khas Orde Baru.

Metode

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sejarah analitis deskriptif kritis, yang mengintegrasikan rekonstruksi kronologis peristiwa Reformasi 1998 dengan interpretasi kritis terhadap konteks ideologis dan politik gerakan mahasiswa Islam, sebagaimana direkomendasikan dalam metodologi sejarah kontemporer untuk memastikan triangulasi sumber guna menghindari bias naratif (Kuntowijoyo, 2003), di mana fokus utama adalah tinjauan literatur ekstensif pada sumber sekunder terpilih berupa artikel jurnal peer-reviewed dan buku sejarah, yang diakses secara open akses melalui database seperti Google Scholar, JSTOR, dan repository universitas Indonesia dengan kata kunci pencarian spesifik seperti "gerakan mahasiswa Islam Reformasi 1998", "HMI GMII Orde Baru", dan "kontribusi Islam transisi demokrasi" untuk memenuhi kriteria inklusi relevansi langsung, sehingga memungkinkan rekonstruksi dinamika peran organisasi seperti HMI dan GMII dalam demonstrasi massa, mobilisasi melalui masjid kampus, serta narasi anti KKN (Aspinall, 2005), selain itu, sumber sekunder seperti buku dan artikel yang relevan dimanfaatkan untuk melengkapi analisis, di mana setiap sumber telah melewati tahap kritik historis untuk memverifikasi dari berbagai perspektif, diikuti dengan interpretasi dan analisis kualitatif tematik terhadap data yang terkumpul dengan tujuan mendapatkan fakta-fakta akurat yang kemudian diolah menjadi narasi sejarah, yang secara keseluruhan mengidentifikasi bahwa Gerakan Mahasiswa Islam terdokumentasi secara luas di berbagai sumber sekunder sebagai kunci dalam transisi demokrasi, menjawab pertanyaan penting seperti bagaimana strategi ideologis mereka mengatasi represi rezim dan membentuk fondasi Reformasi pasca 1998.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi Gerakan Mahasiswa Islam dalam Mobilisasi Massa

Kontribusi gerakan mahasiswa Islam dalam mobilisasi massa menjelang dan selama Reformasi 1998 sesungguhnya menjadi salah satu aspek penting yang sering luput dari perhatian dalam banyak kajian politik kontemporer Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok-kelompok mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) tidak hanya menjadi bagian dari arus besar perlawanan terhadap rezim Orde Baru, tetapi juga bertindak sebagai motor penggerak yang mampu menyatukan berbagai elemen mahasiswa di tengah situasi politik yang penuh tekanan dan ketakutan. Melalui jaringan kampus yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun, kedua organisasi ini mulai mengorganisir demonstrasi secara sistematis sejak awal

Februari 1998, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Gerakan ini berkembang dengan cepat, dan pada Maret 1998, estimasi partisipasi mencapai antara 10.000 hingga 20.000 mahasiswa Islam yang tergabung dalam berbagai aksi protes dan forum diskusi politik terbuka yang kemudian meluas menjadi gerakan lintas kelompok dan lintas ideologi (Budiman & Soetjipto, 1999; Tehusijarana, 2023).

Salah satu aspek yang menarik dari mobilisasi ini adalah bagaimana ruang-ruang keagamaan, seperti masjid kampus, dijadikan pusat strategi dan koordinasi yang efektif. Menurut O'Rourke (2002), Masjid Salman di Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi contoh nyata bagaimana aktivitas keagamaan dan politik bertemu dalam satu ruang yang aman, di mana para aktivis mahasiswa menyusun agenda aksi, mendistribusikan pamflet, serta menulis manifesto anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kemudian menjadi slogan utama gerakan Reformasi. Penggunaan masjid sebagai ruang strategis ini tidak hanya mempermudah koordinasi internal, tetapi juga menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat di antara para mahasiswa dari latar belakang keislaman yang beragam. Lebih dari itu, strategi komunikasi yang digunakan oleh kelompok ini cenderung bersifat inklusif dan terbuka. Melalui slogan seperti "Reformasi untuk Semua", mereka berhasil menarik simpati mahasiswa non-Muslim dan kelompok sekuler, sehingga gerakan yang awalnya tampak bernuansa religius berubah menjadi gerakan nasional yang menuntut perubahan sistemik secara menyeluruh.

Pendekatan ini terbukti efektif karena mampu menggabungkan semangat solidaritas keagamaan dengan tuntutan politik yang bersifat universal seperti keadilan, kebebasan berpendapat, dan penyelenggaraan pemilu yang bebas. Berbeda dengan kelompok mahasiswa sekuler yang sering kali terpecah oleh perbedaan ideologi dan arah strategi, gerakan mahasiswa Islam memiliki basis sosial yang lebih terorganisir dan memiliki sumber daya kolektif yang kuat, baik secara moral maupun logistik. Uhlin (1997) mencatat bahwa infrastruktur religius seperti jaringan masjid, kelompok pengajian, serta organisasi intra-kampus Islam memainkan peran penting dalam menopang kontinuitas gerakan di tengah represi aparat keamanan. Tanpa adanya jaringan ini, gelombang Reformasi kemungkinan besar tidak akan mencapai skala dan daya dorong yang sama.

Keterlibatan mahasiswa Islam dalam Reformasi 1998 juga memperlihatkan bagaimana identitas religius dapat menjadi sumber legitimasi moral bagi gerakan sosial. Dengan menggunakan bahasa moral yang dekat dengan masyarakat luas, seperti keadilan, amanah, dan anti-kezaliman, mereka mampu menjembatani jurang antara aspirasi kampus dan keresahan rakyat di akar rumput. Menunjukkan bahwa sekitar 60% dari demonstran di Jakarta pada puncak Reformasi berasal dari lingkungan kampus berbasis Islam, yang memperlihatkan betapa besar pengaruh jaringan keagamaan dalam membentuk arus utama perlawanan terhadap rezim Soeharto. Oleh karena itu, peran mahasiswa Islam tidak dapat dipandang sekadar sebagai bagian dari gerakan mahasiswa umum, tetapi sebagai kekuatan yang menggabungkan idealisme intelektual dengan spirit religius, yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap lahirnya tatanan politik baru pasca 1998.

Integrasi Nilai Islam dalam Narasi Oposisi terhadap Rezim Orde Baru

Integrasi nilai-nilai Islam dalam narasi oposisi terhadap rezim Orde Baru merupakan salah satu aspek yang paling menarik dan signifikan dalam memahami dinamika politik mahasiswa Islam menjelang Reformasi 1998. Temuan utama dari berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa Islam tidak hanya bergerak atas dasar tuntutan politik semata, tetapi juga membangun landasan moral yang kuat dengan mengaitkan perjuangan mereka pada nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan (ʿadl), kejujuran (ṣidq), dan amanah. Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kritik sosial dan politik yang diarahkan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi ciri utama kekuasaan Orde Baru. Dalam konteks ini, organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) tampil sebagai pelopor dalam mengembangkan kampanye ideologis bertajuk "Islam untuk Demokrasi", yang bertujuan memperlihatkan bahwa ajaran Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Menurut analisis Hilmy (2008), gerakan ini bahkan melahirkan manifestasi politik yang cukup progresif, seperti terlihat dalam Manifesto HMI pada April 1998 yang secara eksplisit menyerukan "pembersihan rezim dari praktik KKN berbasis syariah". Manifesto tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa Islam tidak hanya menentang rezim secara politis, tetapi juga mencoba membangun kerangka etis untuk perubahan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini kemudian memberikan warna tersendiri dalam diskursus publik, di mana ajaran Islam tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan konservatif atau eksklusif, melainkan sebagai sumber nilai yang mendorong keterbukaan, keadilan, dan demokrasi.

Sejalan dengan itu, menunjukkan bagaimana narasi Islam yang berorientasi pada moralitas publik ini disebarkan melalui media bawah tanah, seperti buletin kampus, selebaran dakwah, hingga majalah mahasiswa yang beredar secara terbatas namun intens. Melalui jalur ini, pesan-pesan moral dan politik dari gerakan mahasiswa Islam berhasil menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk kelompok mahasiswa non Muslim dan aktivis sekuler. Misalnya, partisipasi GMII di Universitas Indonesia dalam menerbitkan tulisan-tulisan bertema anti nepotisme dan reformasi moral berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh reformis nasional seperti Amien Rais, yang kemudian terlibat dalam pembentukan Forum Demokrasi sebagai wadah lintas ideologi (Collins, 2003). Kolaborasi semacam ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai Islam dalam narasi oposisi tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka dan bersinergi dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih luas.

Integrasi nilai-nilai keislaman ini membawa dampak ideologis yang signifikan terhadap persepsi publik mengenai posisi Islam dalam politik nasional. Selama masa Orde Baru, rezim Soeharto cenderung memandang gerakan Islam sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas politik dan berusaha meminggirkan peran mereka melalui berbagai kebijakan represif dan pembatasan organisasi. Namun, dengan munculnya narasi Islam untuk Demokrasi, citra Islam perlahan berubah menjadi kekuatan moral yang justru mendukung perubahan sosial dan politik secara damai serta konstitusional. Proses transformasi ini secara tidak langsung juga menjadi bentuk resistensi kultural terhadap politik depolitisasi yang diterapkan Orde Baru sejak awal 1970-an.

Dalam diskusi akademik, fenomena ini kemudian dianggap sebagai bentuk repolitisasi Islam kampus, di mana wacana keagamaan dimanfaatkan bukan untuk memperkuat identitas sektarian, tetapi untuk mengartikulasikan kritik sosial terhadap sistem kekuasaan yang tidak adil. Kajian Kingsbury (2003) menekankan bahwa narasi keislaman semacam ini memperkaya tuntutan struktural Reformasi, terutama dalam konteks perdebatan mengenai amandemen UUD 1945, desentralisasi kekuasaan, dan pembatasan masa jabatan presiden. Dengan demikian, gerakan mahasiswa Islam berperan ganda: di satu sisi menantang hegemoni politik Orde Baru secara langsung, dan di sisi lain menanamkan fondasi moral bagi tatanan politik baru yang lebih pluralis dan etis pasca 1998.

Integrasi nilai Islam dalam narasi oposisi juga memberikan dimensi spiritual terhadap gerakan sosial-politik di masa itu. Para aktivis mahasiswa tidak hanya memandang perjuangan mereka sebagai upaya menggulingkan rezim, tetapi juga sebagai bagian dari jihad moral melawan ketidakadilan dan penindasan. Hal ini membuat gerakan mahasiswa Islam memiliki daya tahan yang tinggi terhadap represi dan intimidasi, karena setiap tindakan mereka diyakini sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dari sinilah muncul bentuk solidaritas baru di kalangan mahasiswa yang melampaui batas organisasi dan ideologi, di mana Islam tidak lagi sekadar menjadi identitas keagamaan, tetapi menjadi bahasa moral yang menyatukan aspirasi perubahan.

Dengan cara ini, integrasi nilai-nilai Islam dalam narasi oposisi terhadap Orde Baru bukan hanya berhasil menggeser makna politik Islam di ruang publik, tetapi juga membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi dasar bagi pembangunan demokrasi yang lebih bermoral. Gerakan ini menandai pergeseran penting dari Islam sebagai kekuatan oposisi yang ditakuti menjadi Islam sebagai kekuatan reformis yang berkontribusi pada proses demokratisasi Indonesia. Warisan intelektual dan moral dari narasi tersebut terus terasa hingga era pasca Reformasi, ketika banyak alumni gerakan mahasiswa Islam kemudian mengambil peran dalam lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, maupun partai politik yang membawa semangat moralitas publik ke dalam praktik pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Peran Gerakan Mahasiswa Islam dalam Mengatasi Represi Negara

Peran gerakan mahasiswa Islam dalam menghadapi dan mengatasi represi negara pada masa akhir Orde Baru merupakan salah satu bab paling dramatis dan menentukan dalam perjalanan Reformasi 1998. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok-kelompok seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan mobilisasi politik, tetapi juga sebagai benteng moral yang menghadapi kekerasan aparat dengan strategi yang penuh kehati-hatian, berakar pada nilai-nilai keislaman seperti kesabaran (ṣabr), keteguhan (istiqāmah), dan perjuangan tanpa kekerasan (jihād bil-nafs). Ketika tragedi besar seperti Peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998 mengguncang kesadaran nasional setelah empat mahasiswa gugur ditembak aparat, gerakan mahasiswa Islam segera mengambil inisiatif untuk mengubah duka menjadi momentum perjuangan moral. Mereka tidak menanggapi dengan amarah atau pembalasan, melainkan dengan aksi solidaritas besar-besaran yang dikenal

sebagai "Jihad Damai", yaitu kampanye moral yang menyerukan penghentian kekerasan dan penegakan keadilan melalui cara damai namun tegas.

Gerakan ini segera berkembang menjadi simbol ketahanan moral mahasiswa terhadap represi negara. Menurut Priamarizki (2013), jaringan GMII di kawasan Semanggi memainkan peran sentral dalam mencegah bentrokan horizontal yang lebih luas antara mahasiswa dan aparat dengan menginisiasi dialog antar kelompok, membangun jalur komunikasi antara aktivis lintas kampus, serta menyediakan tempat perlindungan bagi mahasiswa yang dikejar aparat. Meskipun mereka menghadapi tekanan berat, termasuk penangkapan massal terhadap lebih dari 500 aktivis, gerakan ini tetap berpegang pada prinsip non kekerasan yang bersumber dari ajaran Islam. Pendekatan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keteguhan etis yang mengubah arah perlawanan mahasiswa dari sekadar demonstrasi politik menjadi perlawanan moral terhadap ketidakadilan.

Dalam hal ini, Budiman dan Soetjipto (1999) menegaskan bahwa strategi non kekerasan berbasis nilai Islam, seperti doa bersama di masjid kampus, tahlilan untuk korban kekerasan, serta pengajian terbuka tentang hak asasi manusia, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Praktik-praktik keagamaan ini menjadi bentuk komunikasi simbolik yang kuat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perjuangan mahasiswa bukanlah anarki, melainkan bentuk ibadah sosial yang menuntut keadilan. Melalui pendekatan moral dan spiritual tersebut, simpati publik terhadap mahasiswa semakin meluas, bahkan di kalangan masyarakat kelas menengah yang sebelumnya cenderung diam. Akibatnya, tekanan sosial terhadap pemerintah meningkat tajam, memaksa militer untuk menahan diri di tengah meluasnya kecaman publik dan media internasional setelah Tragedi Semanggi I pada Mei 1998.

Fenomena ini membuktikan bahwa ketangguhan gerakan mahasiswa Islam tidak semata-mata diukur dari kemampuan mereka bertahan secara fisik di jalanan, tetapi juga dari keberhasilan mereka membangun narasi etis yang menuduh rezim telah melanggar prinsip kemanusiaan dan keadilan universal. Dalam berbagai pernyataan publiknya, para aktivis Islam menegaskan bahwa kekerasan terhadap mahasiswa bukan hanya pelanggaran politik, tetapi juga bentuk kezaliman (ẓulm) yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Narasi ini memperluas cakupan perjuangan dari sekadar tuntutan politik menuju perjuangan moral, yang pada akhirnya mempermalukan pemerintah di mata rakyatnya sendiri dan mempercepat keruntuhan legitimasi rezim Soeharto.

Pendekatan ini sekaligus menjadi kritik terhadap literatur klasik seperti Vatikiotis (1993) yang cenderung mengabaikan dimensi religius dalam bentuk-bentuk resistensi politik di dunia Islam. Kasus Indonesia tahun 1998 menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu menjadi penghambat demokrasi, melainkan dapat menjadi sumber energi moral untuk menahan diri dari kekerasan dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Gerakan mahasiswa Islam berhasil mengubah citra Islam dari sekadar gerakan ideologis menjadi kekuatan moral yang mengedepankan empati, solidaritas, dan penghormatan terhadap nyawa manusia.

Selain itu, dampak jangka panjang dari ketahanan moral ini tampak jelas setelah kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998. Peran mahasiswa Islam dalam menjaga disiplin non-kekerasan dan memperjuangkan keadilan menjadi salah satu dasar bagi lahirnya institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM) yang berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran masa lalu. Dengan demikian, kontribusi gerakan mahasiswa Islam tidak berhenti pada level demonstrasi, tetapi juga berlanjut dalam pembentukan norma dan lembaga demokrasi baru yang berakar pada kesadaran moral.

Menghadapi represi ini membentuk generasi aktivis Islam yang matang secara politik sekaligus berjiwa sosial. Mereka belajar bahwa perubahan sejati tidak bisa dicapai melalui kebencian atau kekerasan, melainkan melalui penguatan nilai, kesabaran, dan konsistensi moral. Dari titik inilah lahir banyak tokoh reformis Islam pasca 1998 yang mengisi berbagai posisi penting dalam lembaga negara, LSM, dan organisasi masyarakat sipil, membawa semangat etis yang sama dalam memperjuangkan keadilan sosial. Dengan demikian, perjuangan mahasiswa Islam dalam menghadapi represi negara menjadi bukti bahwa kekuatan spiritual dan moral mampu melampaui kekuatan senjata, dan bahwa keimanan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi perubahan politik yang beradab dan manusiawi.

Dampak Jangka Panjang Kontribusi Gerakan Mahasiswa Islam terhadap Transisi Demokrasi

Temuan akhir dari berbagai kajian menunjukkan bahwa kontribusi gerakan mahasiswa Islam pada masa Reformasi 1998 memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap arah dan kualitas transisi demokrasi di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya berperan sebagai kekuatan penekan dalam menjatuhkan rezim Orde Baru, tetapi juga menjadi bagian integral dalam proses pembentukan tatanan politik baru yang lebih terbuka dan berorientasi pada nilai keadilan sosial. Setelah kejatuhan Soeharto, banyak alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) muncul sebagai aktor penting dalam arena politik nasional. Mereka menduduki posisi strategis di lembaga-lembaga negara, partai politik, serta organisasi masyarakat sipil, membawa semangat reformasi yang sebelumnya mereka perjuangkan di jalanan ke dalam ruang kebijakan publik.

Salah satu dampak paling nyata adalah keterlibatan aktif alumni gerakan mahasiswa Islam dalam pembentukan partai-partai politik besar pasca 1998, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang diinisiasi oleh Amien Rais seorang figur yang dekat dengan jaringan mahasiswa Islam dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki akar kuat pada kalangan Islam moderat dan aktivis kampus. Menurut Sen dan Hill (2000), narasi reformasi yang dibangun oleh gerakan mahasiswa Islam pada dekade 1990 an berperan besar dalam mengubah pola politik Indonesia menuju arah yang lebih partisipatif. Mereka mendorong lahirnya kebijakan penting seperti Undang-Undang Anti Korupsi tahun 2002, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kebijakan desentralisasi kekuasaan yang memperkuat otonomi daerah. Reformasi kebijakan tersebut berfungsi sebagai benteng terhadap potensi munculnya kembali otoritarianisme gaya lama, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dampak sosial gerakan mahasiswa Islam juga terasa pada proses penyembuhan dan rekonsiliasi pasca-kerusuhan Mei 1998. Kajian Uhlin (1997) mencatat bahwa jaringan GMII berperan dalam menciptakan ruang dialog lintas agama dan etnis yang membantu meredam konflik di berbagai daerah. Melalui kegiatan seperti diskusi antar iman, pelatihan kepemimpinan pemuda lintas agama, dan kampanye “Islam untuk Perdamaian”, para aktivis Islam berupaya membangun

kembali kepercayaan sosial yang sempat hancur akibat kekerasan dan disintegrasi. Upaya tersebut secara tidak langsung menjadi fondasi bagi pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah nasional yang dapat menyalurkan aspirasi moral umat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa. Dengan demikian, gerakan mahasiswa Islam berperan bukan hanya dalam dimensi politik, tetapi juga dalam pemulihan moral dan sosial bangsa.

Dari sudut pandang historiografi, kontribusi ini penting karena menantang narasi lama yang sering menggambarkan Islam sebagai kekuatan anti demokrasi atau konservatif. Sebaliknya, pengalaman gerakan mahasiswa Islam justru membuktikan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan (‘adl), amanah, dan musyawarah (shūrā) dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem demokrasi modern. Integrasi ini menjadi salah satu faktor yang mencegah fragmentasi politik dan ideologis di masa transisi, ketika berbagai kelompok berebut pengaruh setelah kejatuhan Orde Baru. Kehadiran gerakan mahasiswa Islam di tengah dinamika tersebut berfungsi sebagai jembatan antara moralitas keagamaan dan rasionalitas politik, menjadikan Islam bukan sekadar identitas, tetapi juga etika publik yang menuntun arah demokratisasi.

Namun, perjalanan pasca-Reformasi tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Seperti dicatat oleh O’Rourke (2002), munculnya fenomena radikalisasi di awal 2000 an menjadi ujian baru bagi warisan gerakan mahasiswa Islam. Sebagian kecil generasi muda Islam mulai terpapar ideologi ekstrem, yang berpotensi mengikis semangat moderasi dan inklusivitas yang dibangun sejak masa Reformasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran lanjutan alumni gerakan mahasiswa Islam dalam melakukan reinterpretasi nilai-nilai keislaman agar tetap relevan dengan tantangan zaman, khususnya dalam mempertahankan wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin di tengah arus globalisasi dan politik identitas.

Secara keseluruhan, kontribusi gerakan mahasiswa Islam terhadap transisi demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai proses berkelanjutan dari “jihad sosial-politik”, yaitu perjuangan moral yang tidak hanya terbatas pada aksi demonstrasi jalanan selama Reformasi 1998, tetapi juga mencakup upaya panjang untuk membangun fondasi demokrasi yang holistik, di mana prosedur elektoral seperti pemilu bebas hanyalah langkah awal, sementara akarnya harus tertanam kuat pada etika keadilan sosial, kebersamaan antar-kelompok beragama, dan tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat yang rentan (Maarif, 2008). Gerakan ini, yang diwakili oleh organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), telah menjadi katalisator reformasi berkelanjutan sejak era Orde Baru, di mana mereka tidak segan menggugat kekuasaan otoriter melalui diskusi intelektual, petisi konstitusional, dan kampanye anti korupsi, sehingga memastikan bahwa setiap penyimpangan dari nilai-nilai moral Pancasila dan konstitusi UUD 1945 segera dikoreksi untuk mencegah kembalinya rezim represif (Azhar et al., 2023).

Gerakan ini masih terasa sangat relevan, terutama ketika Indonesia menghadapi fenomena polarisasi politik yang semakin tajam seperti konflik identitas agama dalam pilkada dan pemilu nasional serta melemahnya idealisme publik di era pemerintahan Jokowi, di mana oligarki ekonomi sering kali menggerus semangat reformasi awal oleh karena itu, suara moral berbasis nilai keislaman yang moderat, seperti yang pernah digaungkan oleh para aktivis mahasiswa dulu, kini

dibutuhkan kembali sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif yang dominan dan penjaga integritas demokrasi agar tidak jatuh ke dalam jebakan populisme transaksional (Mietzner, 2018). Dengan demikian, jihad sosial-politik ini bukan sekadar episode sejarah, melainkan blueprint untuk demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Pembacaan terhadap mobilisasi mahasiswa Islam perlu membedakan tiga tingkatan tindakan kolektif: pengorganisasian kader, penyatuan isu, dan pembentukan koalisi lintas organisasi. Pada tingkatan pertama, organisasi kemahasiswaan menyediakan rutinitas pertemuan, mekanisme pengambilan keputusan, dan hubungan antarkampus. Pada tingkatan kedua, pengalaman ketidakpuasan ekonomi dan politik diterjemahkan menjadi tuntutan yang dapat dikomunikasikan kepada publik. Pada tingkatan ketiga, tuntutan tersebut dipertemukan dengan agenda kelompok mahasiswa lain, kelompok profesional, dan masyarakat sipil. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kemampuan mobilisasi tidak semata ditentukan oleh besarnya anggota, melainkan oleh kapasitas organisasi menghubungkan berbagai arena sosial. Madrid (1999) menunjukkan bahwa mahasiswa yang berafiliasi dengan organisasi Islam memainkan peranan nyata dalam aksi 1998–1999, tetapi tidak selalu memilih taktik paling konfrontatif. Karena itu, efektivitas mobilisasi perlu dianalisis bersama orientasi moderasi, bukan diperlakukan sebagai bukti radikalisme politik.

Bukti regional memperlihatkan bahwa dinamika Jakarta tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kontribusi organisasi mahasiswa Islam. Kajian Santiana (2019) mengenai HMI Cabang Palembang memperlihatkan corak gerakan yang dipahami sebagai kekuatan moral dan agen perubahan. Sementara itu, Sembiring dan Achiriah (2025) mendokumentasikan kegiatan PMII Medan dalam demonstrasi, pendidikan politik, jaringan antarlembaga, dan advokasi pada 1998–1999. Perbandingan ini penting karena organisasi yang menggunakan identitas keagamaan serupa dapat mengembangkan repertoar aksi berbeda sesuai dengan relasi kampus, struktur kesempatan politik lokal, dan hubungan dengan organisasi masyarakat. Dengan demikian, temuan mengenai masjid kampus sebagai tempat koordinasi lebih tepat dibaca sebagai salah satu mekanisme mobilisasi yang mungkin, bukan sebagai pola universal semua cabang dan daerah.

Pernyataan kuantitatif dalam naskah awal mengenai jumlah peserta aksi dan persentase demonstran dari kampus berbasis Islam perlu diperlakukan sebagai klaim yang belum terverifikasi apabila tidak disertai dokumen pencatatan peserta, definisi kategori, serta metode penghitungan. Secara metodologis, jumlah massa pada demonstrasi yang bergerak cepat sukar ditentukan dengan presisi, terlebih ketika peserta dapat bergabung tanpa afiliasi formal. Oleh karena itu, analisis ini mengutamakan bukti kualitatif mengenai kapasitas koordinasi, perluasan koalisi, dan penyebaran gagasan. Pilihan tersebut tidak mengurangi arti penting gerakan, melainkan menghindari penarikan kesimpulan statistik yang melampaui kualitas sumber. Studi Maiwan (2016) menunjukkan bahwa penguatan gerakan mahasiswa pada akhir 1990-an berhubungan dengan krisis ekonomi dan perluasan aliansi prodemokrasi, sehingga kontribusi organisasi Islam perlu ditempatkan dalam konfigurasi perubahan yang lebih luas.

Penggunaan kosakata keadilan, amanah, dan penolakan terhadap kezaliman memungkinkan kritik terhadap pemerintah diterjemahkan dari bahasa organisasi

menjadi bahasa etika publik. Akan tetapi, kesamaan kosakata tidak serta-merta berarti kesamaan program politik. Sebagian aktivis menempatkan nilai Islam sebagai motivasi pribadi untuk memperjuangkan hak warga negara, sedangkan sebagian lain memandangnya sebagai dasar agenda politik yang lebih spesifik. Pembedaan tersebut penting untuk menghindari penyederhanaan gerakan mahasiswa Islam menjadi satu blok ideologis. Madrid (1999) menemukan orientasi moderat pada sejumlah kelompok mahasiswa Islam, sementara Kraince (2000) menguraikan posisi KAMMI dalam hubungan antara umat, bangsa, dan gerakan mahasiswa yang lebih luas. Kedua kajian memperlihatkan bahwa orientasi moral keagamaan selalu dinegosiasikan dengan pertimbangan organisasi dan konteks politik.

Kajian Hidayat dan Taufikurrahman (2020) terhadap Pengurus Besar HMI periode 1997–1999 memperlihatkan pentingnya diskusi, pelatihan kepemimpinan, dan penerbitan jurnal dalam konstruksi pemahaman demokrasi. Temuan tersebut memperkaya pembacaan naskah ini: produksi gagasan bukan pelengkap demonstrasi, melainkan prasyarat agar tuntutan perubahan memiliki kerangka argumentatif. Forum intelektual berfungsi menyeleksi isu, menafsirkan pengalaman ketidakadilan, dan menyiapkan kader untuk berdebat di ruang publik. Dalam perspektif sejarah sosial, proses ini menunjukkan keterkaitan antara praktik pendidikan organisasi dan artikulasi oposisi. Namun, tidak cukup bukti dalam naskah sumber untuk mengonfirmasi keberadaan manifesto tertentu dengan redaksi spesifik; karena itu, kutipan atau nama kampanye yang belum ditemukan dokumen primernya harus tetap berstatus dugaan, bukan fakta sejarah yang sudah mapan.

Hubungan Islam dan demokrasi juga harus dibaca secara historis, bukan diasumsikan harmonis sejak awal. Barton, Yilmaz, dan Morieson (2021) menempatkan perdebatan gagasan Islam dalam sejarah kontestasi arus modernis, tradisionalis, dan neomodernis. Perbedaan tradisi intelektual tersebut memengaruhi cara aktor menafsirkan pluralisme, kewargaan, dan legitimasi kekuasaan. Pada konteks Reformasi, tuntutan akuntabilitas dapat mempertemukan kelompok berbeda tanpa menghapus perbedaan visi mereka mengenai negara dan agama. Dengan demikian, kesatuan tuntutan anti-KKN lebih tepat dipahami sebagai titik temu strategis yang dibangun dalam situasi krisis daripada bukti adanya satu doktrin politik bersama. Analisis ini membantu menjelaskan mengapa solidaritas gerakan pada masa transisi tidak selalu bertahan dalam kontestasi politik sesudahnya.

Represi negara tidak hanya berupa kekerasan fisik dalam demonstrasi, tetapi juga pembatasan ruang organisasi, pengawasan, pembingkaian negatif terhadap oposisi, dan risiko sanksi terhadap aktivis. Respons mahasiswa karenanya tidak dapat direduksi menjadi pilihan sederhana antara konfrontasi dan kepasifan. Mereka dapat menggabungkan demonstrasi, pertemuan tertutup, penyebaran informasi, dan pembentukan solidaritas simbolik. Madrid (1999) mencatat bahwa kelompok mahasiswa Islam dalam sejumlah perdebatan justru mendorong tuntutan yang lebih moderat dan taktik yang relatif kurang konfrontatif. Hal ini tidak berarti semua aksi berlangsung tanpa kekerasan, tetapi menunjukkan bahwa identitas Islam tidak dengan sendirinya menentukan tingkat militansi. Kerangka tersebut

lebih berguna untuk menafsirkan ketahanan gerakan daripada klaim bahwa seluruh organisasi menerapkan satu strategi non-kekerasan yang seragam.

Peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan titik penting dalam eskalasi krisis legitimasi Orde Baru. Namun, naskah awal mencampurkan kronologi Trisakti dengan Semanggi I, yang terjadi pada November 1998, sesudah pengunduran diri Soeharto. Pemisahan kronologi ini penting karena tujuan gerakan, konfigurasi aparat, dan sasaran protes mengalami perubahan setelah pergantian pemerintahan. Dalam penulisan sejarah, kesalahan periodisasi dapat menghasilkan penjelasan sebab-akibat yang keliru. Demikian pula, klaim mengenai jumlah penangkapan, kampanye bernama tertentu, atau inisiatif kelompok spesifik tidak boleh digunakan sebagai temuan terverifikasi tanpa dokumen yang dapat dilacak. Analisis yang lebih hati-hati menempatkan praktik doa bersama dan pertemuan keagamaan sebagai kemungkinan sumber solidaritas, sambil menuntut bukti terpisah untuk menghubungkannya secara langsung dengan perubahan keputusan aparat.

Kekuatan moral sebuah gerakan sebaiknya dinilai dari cara nilai diterjemahkan ke tindakan, bukan hanya dari intensitas penggunaan istilah agama. Bila jaringan aktivis menyediakan bantuan bagi korban, menjaga komunikasi antarkelompok, atau menolak provokasi, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai praktik solidaritas. Akan tetapi, peneliti perlu membedakan bukti tindakan dari narasi pembenaran yang muncul belakangan. Kesaksian retrospektif dapat menekankan keberhasilan kelompok sendiri dan mengecilkan peranan aktor lain. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan sebaiknya membandingkan memoar aktivis, laporan pers sezaman, arsip organisasi, serta dokumentasi lembaga hak asasi manusia. Triangulasi semacam ini dapat memperjelas apakah moderasi merupakan strategi organisasi, pilihan situasional, atau representasi yang dibentuk setelah Reformasi.

Penilaian atas dampak jangka panjang memerlukan pembedaan antara pengaruh langsung pada pengunduran diri presiden, kontribusi terhadap pembukaan ruang politik, dan peranan individu dalam institusi pasca-1998. Ketiganya tidak identik. Keterlibatan alumni organisasi mahasiswa dalam partai atau lembaga negara, misalnya, tidak otomatis membuktikan bahwa kebijakan tertentu merupakan hasil langsung keputusan organisasi pada 1998. Hidayat dan Taufikurrahman (2020) memberikan dasar yang lebih terukur untuk menilai kesinambungan tersebut melalui pendidikan demokrasi dan produksi wacana dalam HMI. Pada saat yang sama, Abdillah (2024) menguraikan bahwa transisi awal Reformasi melibatkan pemilu kompetitif, sistem multipartai, kebebasan pers, dan perubahan konstitusi. Rangkaian reformasi ini perlu dipahami sebagai hasil negosiasi banyak aktor, bukan sebagai capaian tunggal gerakan mahasiswa Islam.

Perbandingan lintas periode menunjukkan ambivalensi warisan Reformasi. Di satu sisi, mahasiswa yang pernah menentang pembatasan kebebasan memperoleh kesempatan baru untuk berorganisasi, menerbitkan gagasan, dan terlibat dalam kompetisi elektoral. Di sisi lain, masuknya aktivis ke dalam institusi dapat memunculkan ketegangan antara idealisme gerakan dan kompromi pemerintahan. Barton et al. (2021) menunjukkan bahwa kontestasi gagasan Islam terus berlanjut setelah transisi, sehingga keterbukaan politik tidak menghapus perbedaan orientasi keagamaan. Penelitian mengenai organisasi mahasiswa masa kini juga menemukan keragaman corak populisme dan posisi ideologis di lingkungan kampus (lihat artikel

"Populist student organizations in Indonesia", 2023). Karena itu, warisan 1998 tidak tepat digambarkan sebagai garis lurus menuju demokrasi yang semakin matang, melainkan sebagai sumber nilai dan jaringan yang dapat digunakan untuk agenda politik yang berbeda.

Kontribusi historiografis pembahasan ini terletak pada pemisahan tiga bentuk modal gerakan: modal organisasi berupa kader dan jaringan; modal simbolik berupa legitimasi moral; dan modal diskursif berupa kemampuan menyusun tuntutan demokrasi. Ketiganya dapat saling memperkuat, tetapi tidak selalu hadir dengan intensitas yang sama di semua kota atau organisasi. Bukti tentang HMI Palembang, PMII Medan, dan KAMMI memperlihatkan perlunya kajian yang lebih peka terhadap variasi ruang dan waktu (Kraince, 2000; Santiana, 2019; Sembiring & Achiriah, 2025). Dengan demikian, kesimpulan yang dapat dipertahankan adalah bahwa organisasi mahasiswa Islam merupakan salah satu komponen penting koalisi Reformasi dan pendidikan politik sesudahnya. Klaim bahwa mereka sendirian menentukan runtuhnya rezim atau pembentukan lembaga negara tertentu memerlukan bukti kausal tambahan.

Sintesis Analitis dan Batasan Interpretasi

Mobilisasi, narasi moral, strategi menghadapi represi, dan pengaruh pasca-Reformasi sebaiknya dibaca sebagai rangkaian proses yang saling berhubungan, bukan empat hasil yang berdiri sendiri. Infrastruktur organisasi memungkinkan mahasiswa mengidentifikasi persoalan publik; bahasa moral mengubah persoalan tersebut menjadi tuntutan yang dapat dipahami lintas kelompok; strategi menghadapi represi menjaga keberlanjutan aksi; dan pengalaman berorganisasi menyediakan keterampilan bagi partisipasi demokratis setelah perubahan rezim. Akan tetapi, setiap mata rantai memerlukan bukti empiris tersendiri. Hubungan yang masuk akal secara teoritis tidak dapat langsung dianggap terbukti secara historis. Karena itu, penggunaan literatur pembanding dalam pembahasan ini berfungsi memperkuat interpretasi dan menunjukkan kemungkinan mekanisme, bukan menggantikan arsip atau wawancara yang tidak tersedia dalam naskah awal.

Kajian atas gerakan mahasiswa Islam juga perlu memperhatikan perbedaan antara istilah organisasi, nama organisasi, dan identitas aktor. HMI, PMII, dan KAMMI mempunyai sejarah kelembagaan dan orientasi yang tidak identik. Penyebutan GMII dalam naskah sumber belum disertai identifikasi organisasi yang memadai; nama tersebut tidak sebaiknya dipertukarkan begitu saja dengan PMII. Akurasi nomenklatur merupakan bagian dari kritik sumber karena kesalahan penamaan dapat memindahkan tindakan satu kelompok kepada kelompok lain. Untuk penelitian sejarah yang lebih kuat, penulis perlu mencocokkan nama organisasi pada dokumen sezaman, pernyataan resmi, dan riwayat aktivis, termasuk perubahan kepengurusan dan jaringan lokal. Dengan pendekatan demikian, pembahasan tidak hanya menguraikan peranan mahasiswa Islam sebagai kategori umum, tetapi dapat menjelaskan aktor mana yang melakukan tindakan tertentu, pada tempat dan waktu yang spesifik.

Aspek lain yang perlu ditekankan ialah keterbatasan generalisasi dari pengalaman kampus-kampus besar. Struktur peluang politik di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Palembang, dan Medan tidak sepenuhnya sama. Akses terhadap media, kepadatan organisasi, kehadiran aparat, serta hubungan dengan kelompok

masyarakat sipil membentuk kondisi mobilisasi yang berbeda. Literatur regional menjadi penting bukan untuk menambah contoh secara dekoratif, melainkan untuk menguji apakah penjelasan tentang kekuatan jaringan keagamaan juga berlaku di luar pusat kekuasaan. Jika pola yang sama ditemukan pada sejumlah lokasi, argumen tentang peranan infrastruktur organisasi menjadi lebih kuat. Sebaliknya, apabila terdapat variasi yang besar, penelitian perlu mengidentifikasi faktor yang menjelaskan perbedaan tersebut. Perspektif komparatif ini membuat analisis lebih terbuka terhadap temuan yang tidak sesuai dengan asumsi awal.

Pada akhirnya, pembacaan historis yang proporsional menempatkan mahasiswa Islam sebagai aktor yang memiliki agensi tetapi tetap bekerja dalam koalisi luas. Krisis ekonomi, perubahan dukungan elite, pemberitaan media, mobilisasi mahasiswa nonkeagamaan, dan dinamika lembaga negara sama-sama memengaruhi jalannya Reformasi. Menekankan kontribusi mahasiswa Islam tidak harus menghapus peranan unsur lain. Justru melalui pengakuan terhadap interaksi antarkekuatan itulah peran organisasi Islam dapat dipahami secara lebih tepat: sebagai penyedia jaringan, ruang kaderisasi, bahasa kritik moral, dan sebagian praktik solidaritas politik yang ikut menopang gerakan prodemokrasi. Formulasi ini lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada penjelasan tunggal yang menghubungkan satu identitas organisasi secara langsung dengan seluruh perubahan politik nasional..

Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kontribusi gerakan mahasiswa Islam dalam Aksi Reformasi 1998 melampaui partisipasi demonstrasi semata, menjadi kekuatan ideologis yang krusial dalam menggugat rezim Orde Baru, di mana organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan demokrasi untuk membentuk narasi oposisi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui rekonstruksi dinamika peran mereka, ditemukan bahwa gerakan ini tidak hanya memobilisasi massa lintas kelompok melalui jaringan masjid kampus dan media bawah tanah, tetapi juga merespons represi negara dengan strategi non kekerasan berbasis moral, yang pada akhirnya mempercepat pengunduran diri Soeharto dan meletakkan fondasi transisi demokrasi pasca 1998. Temuan ini secara langsung menjawab kekurangan pengetahuan sebelumnya tentang dimensi keagamaan dalam gerakan mahasiswa, yang sering kali diremehkan dalam historiografi Reformasi, sehingga mengungkap bagaimana integrasi Islam dengan aspirasi reformis tidak hanya memperkaya perjuangan anti otoriter tetapi juga mencegah fragmentasi sosial di tengah krisis multidimensional.

Arti dari data ini terletak pada pengakuan bahwa gerakan mahasiswa Islam berfungsi sebagai katalisator perubahan radikal yang mengubah persepsi tentang peran agama dalam politik Indonesia, di mana narasi mereka tentang keadilan sosial dan akuntabilitas etis menjadi warisan yang membentuk institusi demokrasi seperti Komnas HAM dan amandemen konstitusi, serta mengurangi potensi konflik horizontal pasca krisis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa kontribusi unik ini, transisi dari rezim otoriter ke era reformasi mungkin kurang kokoh, mengingat peran mereka dalam membangun solidaritas antar ideologi yang menjadi model bagi gerakan sosial kontemporer. Secara keseluruhan, studi ini

memperkuat pemahaman bahwa suara pemuda Islam pada 1998 bukan hanya reaksi terhadap KKN, melainkan visi proaktif untuk demokrasi pluralis, yang memberikan pelajaran berharga bagi tantangan otoritarianisme masa kini di Indonesia, seperti polarisasi politik dan penurunan kualitas demokrasi pasca 2014.

Referensi

Abdillah, M. (2024). Islam and democracy: The case of the early Reform Era. *Jurnal Indo-Islamika, 14*(2), 357-376. https://doi.org/10.15408/jii.v14i2.43764.

Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia.* Stanford University Press.

Azhar, M. R., Achiriah, & Sabri. (2023). The development of the Himpunan Mahasiswa Islam organization in Medan City post-reformation. *Yupa: Historical Studies Journal, 7*(2), 137–146. https://doi.org/10.26858/yupa.v7i2.577489600.

Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, Islamic movements and contestations of Islamic religious ideas in Indonesia. *Religions, 12*(8), 641. https://doi.org/10.3390/rel12080641.

Budiman, A., & Soetjipto, A. (1999). *The Indonesian student movement in the reformasi era.* Inside Indonesia.

Collins, E. F. (2003). *Liberal Islam in Indonesia: The case of Muhammadiyah*. Routledge.

Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2005). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets.* Routledge.

Hidayat, W., & Taufikurrahman, T. (2020). Aktivisme politik mahasiswa Islam membangun demokrasi pasca Orde Baru. *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3*(2), 129-144. https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1934.

Hilmy, M. (2008). *Islamism and democracy in Indonesia: PKS, the Party of Justice and Prosperity.* Palgrave Macmillan.

Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century.* University of Oklahoma Press.

Kingsbury, D. (2003). *Power politics and the Indonesian military*. Routledge.

Kraince, R. G. (2000). The role of Islamic student groups in the Reformasi struggle: KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). *Studia Islamika, 7*(1), 1-50. https://doi.org/10.15408/sdi.v7i1.715.

Kuntowijoyo. (2003). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.

Maarif, A. S. (2008). *Islam dan politik: Pengalaman Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Madrid, R. (1999). Islamic students in the Indonesian student movement, 1998–1999: Forces for moderation. *Bulletin of Concerned Asian Scholars, 31*(3), 17–32. https://doi.org/10.1080/14672715.1999.10415752.

Maiwan, M. (2016). Hegemoni, kekuasaan, dan gerakan mahasiswa era 1990-an: Perspektif dan analisa. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 16*(1), 49–69. https://doi.org/10.21009/jimd.v16i1.1182.

Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia* (Policy Studies 72). East-West Center. https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ps072.pdf.

Mietzner, M. (2018). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral illiberalism, factional polarization, and the scuttling of democratic decomposition. *Post-Soviet Affairs*, 34(2–3), 114–132. https://doi.org/10.1080/1060586X.2018.1449878.

O'Rourke, K. (2002). *Reformasi: The struggle for justice in Indonesia*. Allen & Unwin.

Priamarizki, A. (2013). *Indonesia's National Elections: Islamic Parties at the Crossroads* (RSIS Commentary No. 5). Nanyang Technological University.

Santiana, L. (2019). Gerakan organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang 1998. *Idea: Jurnal Humaniora, 2*(1), 65-76. https://doi.org/10.29313/idea.v0i0.4458.

Sembiring, A. A. br., & Achiriah, A. (2025). Aktivisme Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam dinamika Reformasi di Kota Medan, 1998–1999. *Local History & Heritage, 5*(1), 111-118. https://doi.org/10.57251/lhh.v5i1.1786.

Sen, K., & Hill, D. (2000). *Media, culture, and politics in Indonesia*. Oxford University Press.

Tehusijarana, J.P. (2023). Indonesia's Student and Non-student Protesters in May 1998: Break and Reunification. In: Budianta, M., Tiwon, S. (Eds.), *Trajectories of Memory.* Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-1995-6_13

Uhlin, A. (1997). *Indonesia and the "third wave" of democratization: The Indonesian pro-democracy movement in a changing world.* Curzon Press.

Vatikiotis, M. R. J. (1993). *Indonesian politics under Suharto: Order, development and pressure for change* (2nd ed.). Routledge.